

HIRARKI WILAYAH KOTA MANADO

Andrey Roland Gunena¹, Sonny Tilaar², & Esli Takumansang³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota. Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi

^{2&4}Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Kota Manado terdiri dari 11 Kecamatan yakni Kecamatan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, Kecamatan Wenang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Malalayang yang pembangunan prasarananya baik sosial, ekonomi, dan pemerintahannya dalam hal kualitas maupun kuantitas berbeda-beda. Penentuan hirarki di Kota Manado akan membuat Kota Manado menjadi kota yang pembangunannya menjadi lebih terstruktur. Penelitian ini bertujuan menentukan hirarki wilayah Kota Manado dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Manado. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dgn metode analisis Skalogram. Metode analisis Skalogram dipakai untuk menentukan Orde berdasarkan prasarana yang ada dimasing-masing kecamatan yang ada di Kota Manado. Dari hasil penelitian diatas diperoleh hirarki wilayah Kota Manado terbagi dalam 4 Orde, yakni Orde I yang terdiri dari Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tuminting. Orde II yang terdiri dari Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Singkil. Orde III Kecamatan Bunaken. Orde IV yang terdiri dari Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan.

Kata Kunci: Kota Manado, Hirarki Wilayah, Analisis Skalogram

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyeraskan laju pertumbuhan antar kota dan desa sehingga mencapai keseimbangan melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal dan infrastruktur. Secara garis besar, terdapat tiga konsep utama pengembangan wilayah, yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional (*functional integration*) dan pendekatan desentralisasi (Rondinelli, 1985). Upaya pengembangan wilayah juga harus diarahkan pada pemecahan masalah ketimpangan antar wilayah. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah adalah terciptanya kemandirian dan kemajuan daerah yang merata. Untuk mencapai tujuan tersebut harus disusun kebijaksanaan di daerah, antara lain kebijaksanaan pembangunan kota-kota dengan mengembangkan kota-kota yang

tersusun secara hirarki dan tersebar di seluruh wilayah. Dalam perspektif sistem, wilayah dapat dipandang sebagai suatu sistem kota-kota/ perkotaan. Sistem kota-kota merupakan sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota dan hirarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan parasarana wilayah lainnya.

Hirarki kota merupakan sistem yang paling efisien dalam menjalankan perkembangan wilayah. Dengan menciptakan hirarki pusat-pusat pengembangan wilayah (kota), maka proses pertumbuhan dan pembangunan wilayah dapat dipercepat. Hierarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis fasilitas juga berbeda. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota (jumlah penduduk). Perbedaan fungsi ini juga sekaligus menggambarkan

perbedaan luas pengaruh. Dengan demikian, ada kota yang menjalankan banyak fungsi sekaligus dengan kualitas pelayanan yang tinggi dan ada kota yang hanya menjalankan beberapa fungsi saja dengan kualitas yang kurang memadai. Sejalan dengan itu, ada kota yang wilayah pengaruhnya cukup luas bahkan juga termasuk kota-kota yang lebih kecil di sekitarnya dan ada kota yang pengaruhnya hanya beberapa desa di sekitarnya saja.

Hierarki perkotaan sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah karena menyangkut fungsi yang ingin diarahkan untuk masing-masing kota. Terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang akan dibangun di masing-masing kota. Banyaknya fasilitas yang harus tersedia di masing-masing kota harus sejalan dengan luas pengaruh kota tersebut, atau jumlah penduduk yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kota Manado sebagai salah satu dari Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara, merupakan kota yang sedang berkembang dengan dinamika pembangunan yang dinamis. Pelaksanaan pembangunan akan sesuai harapan apabila perencanaannya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Wilayah

Tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah. Definisi wilayah menurut Undang-Undang No. 24/92 tentang Penataan Ruang

- Definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Kota

Pengertian kota secara umum adalah tempat bermukim, bekerja, dan kegiatan warga kota baik itu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dll. Menurut kamus tata ruang

kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, dan kepadatan penduduk relatif tinggi.

Menurut UU No. 22 th. 1999 Tentang Otonomi Daerah kota adalah:

- Kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Hirarki

Kata hirarki (hierarchy) pada dasarnya merupakan organisasi dengan susunan secara bertingkat (Salim,1996) . Menurut Nasoetion (1985) dalam Sukasmianto (1999), ada dua macam hirarki yaitu hirarki fungsional dan hirarki tata ruang. Hirarki fungsional terentuk akibat pengelompokkan kegiatan sosial dan ekonomi tertentu pada tempat tertentu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan. Sedangkan hirarki tata ruang mengacu kepada system tata ruang wilayah. Hirarki perkotaan (Robinson Tarigan 2004) menyatakan tempat-tempat konsentrasi yang umumnya berupa daerah perkotaan tersebar di suatu wilayah/negara dengan penduduk (besarnya kota) yang tidak sama

Prasarana dan sarana

Berbicara mengenai fasilitas-fasilitas sosial. Ekoomi, maupun pemerintahan, sudah pasti akan berhubungan dengan sarana serta prasarana.

Menurut Darsini, Nanik (1999) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.

Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang digunakan orang banyak atau fasilitas yang ditujukan untuk dipakai bersama. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan

oleh pemerintah atau swasta yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jenis-jenis fasilitas sosial yakni fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Menurut Conyers, D. dan P. Hills (1984) sarana/fasilitas sosial dapat meliputi diantaranya:

Fasilitas Pendidikan, terdiri dari::

- Taman Kanak-Kanak (TK);
- Sekolah Dasar (SD);
- Sekolah Lanjutan Pertama (SLP); dan
- Sekolah Lanjutan Atas (SLA).

Fasilitas kesehatan, terdiri dari:

- Balai pengobatan;
- BKIA + Rumah bersalin;
- Puskesmas dan Balai pengobatan;
- Rumah sakit daerah/wilayah;
- Tempat praktek dokter;
- Apotek/toko obat.

Fasilitas pelayanan kesejahteraan meliputi

- Tempat ibadah
- Balai Pertemuan
- Tempat hiburan

Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi adalah fasilitas yang disediakan pemerintah dalam rangka menunjang perekonomian dalam suatu wilayah. Fasilitas ekonomi ini pun bisa disediakan oleh pihak swasta. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Conyers, D. dan P. Hills (1984) sarana/fasilitas ekonomi dan perdagangan dapat meliputi diantaranya:

- Warung/kios, merupakan unit usaha ekonomi skala terkecil;
- Pertokoan, merupakan unit usaha ekonomi skala sedang - besar;
- Pusat perbelanjaan skala lingkungan (toko dan pasar); dan
- Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor-kantor, industri kecil).

Fasilitas Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi

pelayanan untuk masyarakat. Jenis-jenis fasilitas pemerintahan seperti kantor-kantor pemerintah atau kantor pelayanan publik

METODOLOGI

Sesuai dengan judul dari penelitian ini yaitu Hirarki Wilayah Perkotaan Manado, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah ketersediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta untuk menentukan hirarki wilayah kota Manado dengan analisis skalogram, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode pengumpulan data primer dan sekunder. Dimana data-data sekunder yang diperlukan dan berkaitan dengan wilayah studi didapat melalui literature, internet, serta instansi-instansi terkait seperti kantor kecamatan, dan kantor Badan Pusat Statistik Manado yang memiliki sumber yang jelas.

Data yang digunakan

Data yang digunakan merupakan data yang dapat dipercaya, dengan sumber data yaitu:

- Badan Pusat Statistik Manado
- Kantor Dinas Kecamatan di 11 Kecamatan Kota Manado

Cara Memperoleh Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi dan kantor yang berhubungan dengan penelitian ini, dan data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dilapangan penelitian.

Macam Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni data dalam bentuk tabel, fungsinya untuk membantu analisis. Data yang dikumpulkan meliputi:

- Data fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di 11 kecamatan di Kota Manado
- Data jumlah penduduk di 11 kecamatan di Kota Manado

Teknik Analisis Hirarki Wilayah Perkotaan

Hirarki wilayah perkotaan merupakan tingkatan yang menggambarkan jenjang fungsi wilayah perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Berdasarkan RTRW Kota Manado 2014-2034, rencana pusat pelayanan wilayah kota Manado yakni:

Pusat perdagangan dan jasa, perkantoran dan pariwisata skala regional kota berlokasi di :

- Kelurahan Pinaesaan;
- Kelurahan Calaca;
- Kelurahan Wenang Utara;
- Kelurahan Wenang Selatan;
- Kelurahan Sario Tumpaan;
- Kelurahan Sario Utara; dan
- Kawasan Reklamasi.

pusat pelayanan pemerintahan tingkat kota berlokasi

- Kecamatan Tikala,
- Kecamatan Mapanget
- Pusat pemerintahan tingkat Provinsi di Kecamatan Wanea dan Kecamatan Mapanget.

pusat pelayanan kesehatan

- Kecamatan Malalayang.

Dalam menganalisis hirarki suatu wilayah, tentu ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis hirarki wilayah. Dari beberapa teknik yang ada, pada kesempatan ini teknik yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis Skalogram Guttman. Analisis Skalogram Guttman merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas/prasarana yang dimilikinya, dengan demikian dapat ditentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap merupakan pusat pelayanan, sedangkan wilayah dengan fasilitas yang kurang akan menjadi daerah belakang. Jadi berdasarkan Analisis Skalogram, ordenya adalah sebagai berikut:

- Orde 1 : Wilayah dengan jumlah fasilitas/prasarana terbanyak

- Orde 2 : Wilayah dengan jumlah fasilitas/prasarana lebih sedikit dari Orde 1
- Orde 3 : Wilayah dengan jumlah fasilitas/prasarana lebih sedikit dari Orde 2
- Orde 4 : Wilayah dengan jumlah fasilitas/prasarana lebih sedikit dari orde 3.

Begitu seterusnya, jika jumlah orde yang dianalisis dalam suatu wilayah lebih dari 4

Skalogram digunakan untuk menganalisis pusat-pusat pemukiman, khususnya hierarki atau orde pusat-pusat pemukiman. Subjek dalam analisis ini merupakan pusat pemukiman (*settlement*), sedangkan obyek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Dengan beberapa tambahan analisis, misalnya aturan Marshall, atau algoritma Reed-Muench, tabel skalogram menjadi indikasi awal analisis jangkauan pelayanan setiap fungsi dan pusat pemukiman yang dihasilkan. Teknik ini untuk memberikan gambaran adanya pengelompokan pemukiman sebagai pusat pelayanan dengan mendasarkan pada kelengkapan fungsi pelayanannya. Ukuran fasilitas yang dinilai adalah jumlah dan kelengkapannya. Fasilitas yang digunakan pada penilaian ini adalah fasilitas yang mencirikan fungsi pelayanan sosial dan ekonomi. Skalogram diperoleh dengan cara membuat suatu tabel yang mengurutkan keberadaan fasilitas suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai pusat pelayanan. Dengan beberapa tambahan analisis, misalnya aturan Marshall, atau algoritma Reed-Muench, tabel skalogram menjadi indikasi awal analisis jangkauan pelayanan setiap fungsi dan pusat pemukiman yang dihasilkan. Prosedur pengerjaan metode Skalogram Guttman adalah sebagai berikut:

- Identifikasi semua kawasan perkotaan yang ada.
- Membuat urutan pemukiman berdasarkan jumlah penduduk pada bagian sebelah kiri tabel kerja.
- Membuat urutan fasilitas yang ditemukan berdasarkan frekuensi yang ditemukan, pada bagian atas.

- Membuat garis baris dan kolom sehingga lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan fasilitas yang ada pada masing-masing pusat pelayanan atau kota.
- Menggunakan tanda (1) pada sel yang menyatakan keberadaan suatu fasilitas, dan tanda (0) pada sel yang menyatakan ketiadaan suatu fasilitas.
- Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas, semakin banyak fasilitas yang didapati pada suatu pemukiman maka pemukiman tersebut berada pada urutan atas.
- Mengidentifikasi peringkat atau hierarki pemukiman yang dapat diinterpretasikan berdasarkan prosentase keberadaan fasilitas pada suatu pemukiman. Semakin tinggi prosentasenya, maka hierarki pemukiman tersebut akan semakin tinggi.

Tahap Analisa Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data untuk mencapai tujuan yakni dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk tabel dan penjelasan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis data jumlah fasilitas sosial ekonomi dan pemerintahan agar bisa menentukan hirarki wilayah Kota Manado. Hirarki dicari dengan menggunakan Skalogram.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara. Waktu Penelitian yakni bulan Maret sampai dengan Mei 2016.

Batasan Penelitian

Mengenai batasan penelitian, terutama dalam hal menyangkut fasilitas/prasarana sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang begitu banyak jenisnya dalam wilayah Kota Manado berbanding dengan tingkat perkembangan jumlah

penduduk tiap tahunnya, sehingga fasilitas yang ada harus lebih terpenuhi lagi dan dijaga dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan. Untuk itu dalam penelitian ini hal yang akan diidentifikasi yakni pendidikan, kesehatan, dan peribadatan dalam hal jumlah fasilitas sosial, serta pasar, bank, hotel, dan pertokoan untuk fasilitas ekonomi dan kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan public untuk fasilitas pemerintahan berupa kantor kecamatan dan kantor kelurahan Analisis penentuan hirarki berdasarkan hasil identifikasi fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintah yang menjadi fokus penelitian di Kota Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 27 °C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ±84 %.

Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektare. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa.

Batas wilayah Kota Manado adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Batas Wilayah Kota Manado

Utara	Kabupaten Minahasa Utara dan Selat mantehage
Selatan	Kabupaten Minahasa
Barat	Teluk Manado
Timur	Kabupaten Minahasa

Tabel 2. Kecamatan di Kota Manado

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Bunaken	36.19	5	20.977
2	Bunaken Kepulauan	16.85	4	6.144
3	Tuminting	4.31	9	51.410
4	Singkil	4.68	7	48.039
5	Mapanget	49.75	10	51.631
6	Paal Dua	8.02	7	41.970
7	Tikala	7.10	9	29.384
8	Wanea	7.85	5	36.177
9	Wenang	3.64	10	56.213
10	Sario	1.75	9	24.549
11	Malalayang	17.12	12	56.799



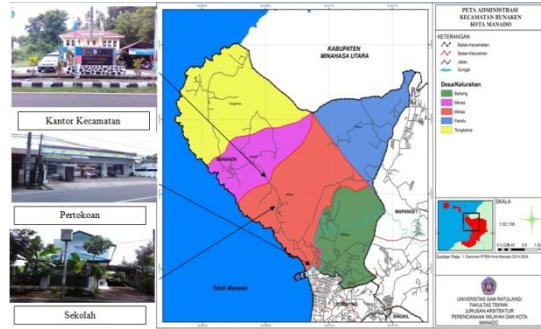
Gambar 1. Peta Administrasi Kota Manado

Identifikasi Sebaran Fasilitas Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan

Kecamatan Bunaken

Tabel 3. Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan	Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan		
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	
TK	8	Rumah Sakit	-	Gereja	68	Pasar	2	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	6
SD	13	Puskesmas Umum	2	Masjid/Mushola	19	Hotel/Cottage	1		
SMP	11	PUSTU/Keliling	-	Vihara	-	Toko/Mini Market	6		
SMA	10	Posvandu	14	Pura	-	Warung/Kios	152		
Perguruan Tinggi	1	Apotek	-	Klenteng	-		2		

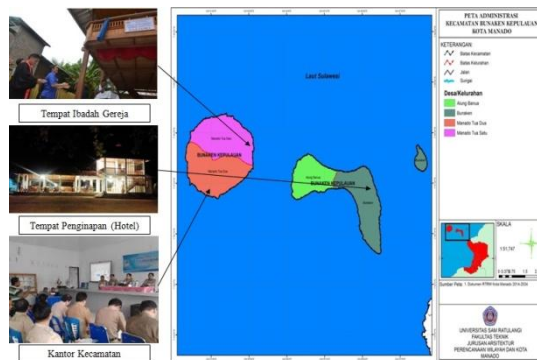


Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan

Tabel 4. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan	Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan		
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	
TK	5	Rumah Sakit	-	Gereja	24	Pasar	-	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	6
SD	9	Puskesmas Umum	-	Masjid/Mushola	1	Hotel/Cottage	7		
SMP	2	PUSTU/Keliling	4	Vihara	-	Toko/Mini Market	4		
SMA	1	Posvandu	17	Pura	-	Warung/Kios	58		
Perguruan Tinggi	-	Apotek	-	Klenteng	-				

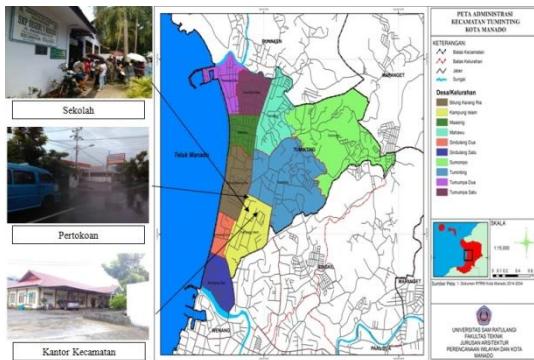


Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kecamatan Tuminting

Tabel 5. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan	Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan		
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	
TK	15	Rumah Sakit	1	Gereja	55	Pasar	1	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	8
SD	36	Puskesmas Umum	1	Masjid/Mushola	36	Hotel/Cottage	4		
SMP	7	PUSTU/Keliling	6	Vihara	-	Toko/Mini Market	76		
SMA	7	Posyandu	48	Pura	-	Warung/Kios	706		
Perguruan Tinggi	2	Apotek	5	Klenteng	-				

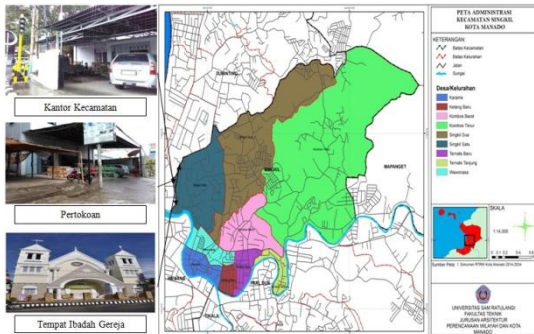


Gambar 4. Peta Administrasi Kecamatan Tuminting

Kecamatan Singkil

Tabel 6. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan	Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan		
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	
TK	16	Rumah Sakit	-	Gereja	34	Pasar	-	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	10
SD	21	Puskesmas Umum	2	Masjid/Mushola	32	Hotel/Cottage	4		
SMP	5	PUSTU/Keliling	2	Vihara	2	Toko/Mini Market	5		
SMA	2	Posyandu	48	Pura	-	Warung/Kios	443		
Perguruan Tinggi	-	Apotek	4	Klenteng	-				

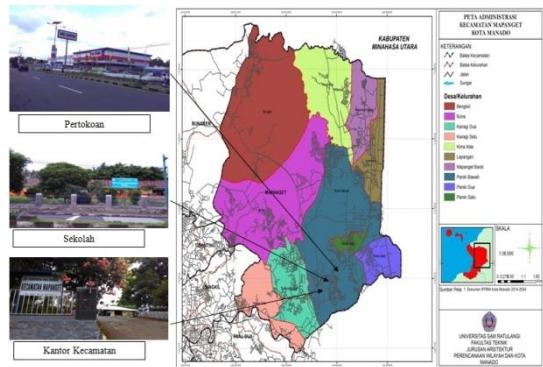


Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Singkil

Kecamatan Mapanget

Tabel 7. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan	Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan		
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	
TK	26	Rumah Sakit	2	Gereja	105	Pasar	2	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	11
SD	20	Puskesmas Umum	2	Masjid/Mushola	19	Hotel/Cottage	1		
SMP	8	PUSTU/Keliling	6	Vihara	1	Toko/Mini Market	35		
SMA	4	Posyandu	48	Pura	-	Warung/Kios	226		
Perguruan Tinggi	2	Apotek	5	Klenteng	1				

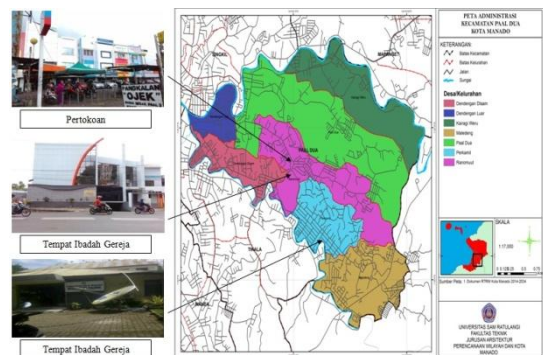


Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Mapanget

Kecamatan Paal Dua

Tabel 8. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan	Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan		
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	
TK	-	Rumah Sakit	1	Gereja	53	Pasar	1	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	8
SD	23	Puskesmas Umum	5	Masjid/Mushola	29	Hotel/Cottage	-		
SMP	11	PUSTU/Keliling	-	Vihara	1	Toko/Mini Market	65		
SMA	3	Posyandu	52	Pura	-	Warung/Kios	213		
Perguruan Tinggi	4	Apotek	6	Klenteng	-				

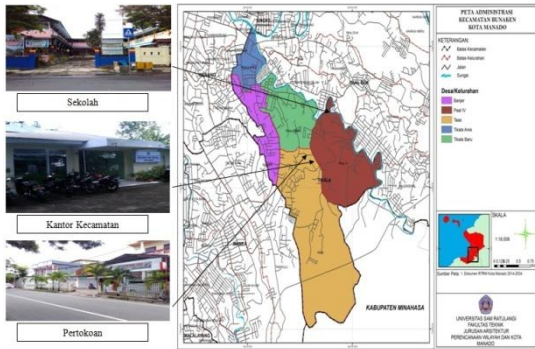


Gambar 7. Peta Administrasi Kecamatan Paal Dua

Kecamatan Tikala

Tabel 9. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan		Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
TK	-	Rumah Sakit	0	Gereja	35	Pasar	-	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	25
SD	21	Puskemas Umum	1	Masjid/Mushola	13	Hotel/Cottage	1		
SMP	8	PUSTU/Keliling	-	Vihara	-	Toko/Mini Market	23		
SMA	7	Posyandu	19	Pura	-	Warung/Kios	202		
Perguruan Tinggi	-	Apotek	5	Klenteng	-				



Gambar 8. Peta Administrasi Kecamatan Tikala

Kecamatan Wenang

Tabel 11. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan		Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
TK	21	Rumah Sakit	2	Gereja	87	Pasar	1	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	10
SD	43	Puskemas Umum	4	Masjid/Mushola	19	Hotel/Cottage	2		
SMP	12	PUSTU/Keliling	3	Vihara	-	Toko/Mini Market	9		
SMA	10	Posyandu	34	Pura	-	Warung/Kios	384		
Perguruan Tinggi	4	Apotek	13	Klenteng	-				



Gambar 10. Peta Administrasi Kecamatan Wanea

Kecamatan Wenang

Tabel 10. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan		Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
TK	22	Rumah Sakit	4	Gereja	46	Pasar	1	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	10
SD	41	Puskemas Umum	1	Masjid/Mushola	18	Hotel/Cottage	13		
SMP	13	PUSTU/Keliling	4	Vihara	-	Toko/Mini Market	12		
SMA	11	Posyandu	27	Pura	-	Warung/Kios	527		
Perguruan Tinggi	4	Apotek	17	Klenteng	-				

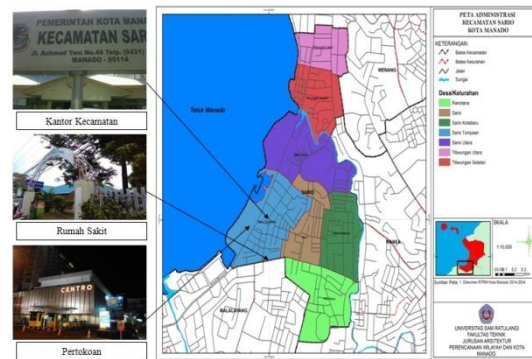


Gambar 9. Peta Administrasi Kecamatan Wenang

Kecamatan Sario

Tabel 12. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pendidikan		Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
TK	-	Rumah Sakit	2	Gereja	21	Pasar	-	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	8
SD	14	Puskemas Umum	2	Masjid/Mushola	7	Hotel/Cottage	4		
SMP	6	PUSTU/Keliling	3	Vihara	-	Toko/Mini Market	141		
SMA	6	Posyandu	7	Pura	-	Warung/Kios	121		
Perguruan Tinggi	2	Apotek	11	Klenteng	-				

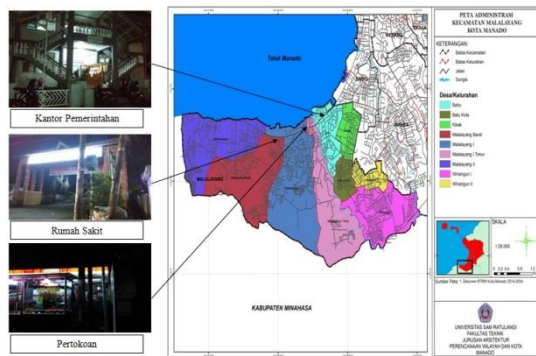


Gambar 11. Peta Administrasi Kecamatan Sario

Kecamatan Malalayang

Tabel 13. Fasilitas Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Fasilitas Sosial Pemerintahan		Fasilitas Sosial Kesehatan		Fasilitas Sosial Peribadatan		Fasilitas Ekonomi		Fasilitas Pemerintahan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
TK	29	Rumah Sakit	3	Gereja	76	Pasar	1	Perkantoran Pemerintahan/Pelayanan Publik	10
SD	25	Puskesmas Umum	2	Masjid/Mushola	14	Hotel/Cottage	3		
SMP	10	PUSTU/Keliling	4	Vihara	-	Toko/Mini Market	69		
SMA	7	Posyandu	26	Pura	-	Warung/Kios	186		
Perguruan Tinggi	7	Apotek	13	Klenteng	-				



Gambar 12. Peta Administrasi Kecamatan Malalayang

Analisis Hirarki Wilayah Kota Manado Berdasarkan Analisis Skalogram

Tabel 14. Jumlah dan Jenis Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di Kota Manado

No	Kecamatan	Penduduk	TK	SD	SMP	SMA	Posyandu	Perguruan Tinggi	Rumah Sakit	Puskesmas Umum	PUSTU/Keliling	Posyandu	Apotek	Peribadatan	Pasar	Toko/Mini Market	Warung/Kios	Perkantoran Pemerintahan	Hotel/Cottage	JUMLAH
1	Bunaken Kepulauan	6.144	5	9	2	1	-	-	4	17	-	25	-	-	-	58	5	7	132	
2	Bunaken	20.977	8	13	11	10	1	2	-	14	-	87	-	6	152	10	1	315		
3	Tuminting	51.410	15	36	7	7	2	1	1	6	48	5	91	1	78	706	14	4	1022	
4	Singkil	48.039	16	21	5	2	-	2	2	47	4	68	0	5	443	10	4	629		
5	Mapanget	51.631	26	20	8	4	2	2	2	6	20	5	73	2	35	226	11	1	443	
6	Paal Dua	41.970	-	23	11	3	4	1	5	0	52	6	82	1	65	213	13	-	479	
7	Tikala	29.348	-	21	8	7	-	0	1	0	19	5	48	-	23	202	25	1	360	
8	Wenang	36.177	22	41	13	11	4	4	4	4	27	17	64	0	12	527	10	13	770	
9	Wanea	56.213	21	43	12	10	4	2	4	3	34	13	106	1	9	384	10	2	658	
10	Sario	24.549	-	14	6	2	2	2	3	7	11	28	1	141	121	8	4	356		
11	Malalayang	56.799	29	25	10	7	7	3	2	4	26	13	90	1	69	186	10	3	485	
	JUMLAH	423.257	142	266	93	67	26	15	22	32	311	79	762	7	443	3218	126	40		

Tabel 15. Analisis Skalogram

No	Kecamatan	Penduduk	SD	SMP	SMA	Posyandu	Peribadatan	Warung/Kios	Hotel/Cottage	Toko/Mini Market	Puskesmas Umum	Apotek	Perguruan Tinggi	TK	Rumah Sakit	Pasar	JUMLAH
1	Malalayang	56.799	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
2	Mapanget	51.631	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
3	Wanea	56.213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
5	Wenang	36.177	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
7	Tuminting	51.410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
4	Paal Dua	41.970	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	14
6	Sario	24.549	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	14
8	Singkil	48.039	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	13
10	Bunaken	20.977	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
9	Tikala	29.348	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	11
11	Bunaken Kepulauan	6.144	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	JUMLAH	423.257	11	11	11	11	11	11	10	10	10	9	8	8	8	7	154

Mencari jumlah orde dengan rumus Sturges:

$$K = 1 + 3.3 \log n \quad n = \text{Jumlah Kecamatan}$$

$$K = 1 + 3.3 \log 11$$

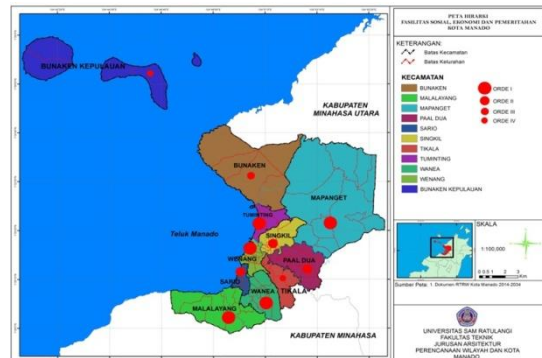
$$K = 1 + 3.3 (1.041)$$

$$K = 1 + 3.3435$$

$$K = 4.435$$

Tabel 16. Penentuan Presentase dan Orde

No	Kecamatan	Penduduk	SD	SMP	SMA	Posyandu	Peribadatan	Warung/Kios	Hotel/Cottage	Toko/Mini Market	Puskesmas Umum	Apotek	Perguruan Tinggi	PUSTU/Keliling	TK	Rumah Sakit	Pasar	JUMLAH	Presentase	Orde
1	Malalayang	56.799	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	10.45%	I
2	Mapanget	51.631	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	10.45%	I
3	Wanea	56.213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	10.45%	I
5	Wenang	36.177	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	10.45%	I
7	Tuminting	51.410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	10.45%	I
4	Paal Dua	41.970	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	14	9.99%	II
6	Sario	24.549	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	14	9.99%	II
8	Singkil	48.039	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	13	8.44%	III
10	Bunaken	20.977	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12	7.80%	III
9	Tikala	29.348	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	7.34%	IV
11	Bunaken Kepulauan	6.144	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6.50%	IV
	JUMLAH	423.257	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	9	8	8	7	6	154	100%	



Gambar 13. Peta Hirarki Wilayah Kota Manado Berdasarkan Analisis Skalogram

Kesimpulan

Sebaran fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kota Manado, penyebarannya telah cukup memadai terutama dikecamatan yang berstatus orde I seperti Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Tuminting. Semua kecamatan tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Sedangkan untuk Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario, Kecamatan Singkil sebaran fasilitas terbilang cukup tapi untuk jenis fasilitas yang ada, belum memadai. Untuk Kecamatan

Tikala jumlah fasilitasnya cukup, hanya jenis fasilitasnya saja yang kurang. Sedangkan untuk Kecamatan Bunaken Kepulauan fasilitas berdasarkan data yang di peroleh, penyebarannya belumlah memadai, begitupun dengan jenis fasilitasnya yang kurang lengkap.

Saran

Kepada masyarakat Kota Manado, agar kiranya selalu menjaga, melindungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia oleh pemerintah, maupun swasta dengan sebaik-baiknya.

Kepada pemerintah baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota, agar selalu memperhatikan fasilitas apa yang harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena seiring dengan meningkatnya kualitas ataupun kuantitas dari fasilitas yang ada, maka masyarakat pun akan semakin dimudahkan dengan fasilitas yang ada. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih dalam lagi di Kota Manado mengenai hirarki wilayah perkotaan Manado demi meningkatkan Kota Manado menjadi lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Panuju, D.R dan Rustiadi, E 2012. Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bagian Perencanaan Pengembangan Wilayah IPB. Bogor
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- D. Conyes dan Hill. 1984. Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga (Terjemahan). Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Darsini, Nanik. 1999. Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi. Malang. Universitas Negeri Malang
- Tamsir Rifky. 2012. Tinjauan yuridis Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. Jakarta. Universitas Hasanudin Makasar
- Suratno. 2005. Pengaruh Penyediaan Fasilitas Sosial Terhadap Harga Jual Perumahan Di Batam Center Kota Batam. Tesis S2 Magister Fakultas Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang
- Purwanto. 2010. Analisis Kebijakan Dalam Pengadaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di DKI Jakarta. Tesis S2 Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Kekhususan Manajemen Sektor Publik-Infrastruktur Universitas Indonesia.
- Undang-undang No. 22 th. 1999. Tentang Otonomi
- Daerah Undang-undang No. 24/92 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Manado Dalam angka 2014
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034